



Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Sebagai Strategi Pembentukan Civic Virtue Generasi Digital di Kabupaten Buleleng

I Gede Eka Putra^{1*}, I Nengah Suastika², I Wayan Budiarta³

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Corresponding author: eka.putra@student.undiksha.ac.id

Abstrak

Generasi digital menghadapi tantangan kompleks yang mengancam kualitas kewarganegaraan, seperti disinformasi dan perundungan siber (*cyberbullying*). Di Kabupaten Buleleng, kondisi ini diperparah oleh dinamika kriminalitas remaja, penyalahgunaan narkoba, kejahatan siber, serta maraknya promosi judi daring melalui media sosial. Pemerintah Kabupaten Buleleng merespons melalui Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sebagai strategi pendidikan nonformal untuk memperkuat kebijakan kewarganegaraan (*civic virtue*) generasi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis PPWK sebagai strategi pembentukan *civic virtue* generasi digital di Kabupaten Buleleng dengan menelaah model pendidikan yang diterapkan serta persepsi peserta program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus (*case study*), didukung data kuesioner dari 64 peserta. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, studi dokumentasi, dan kuesioner skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (*data condensation, data display, serta conclusion drawing and verification*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPWK menerapkan strategi pendidikan berbasis internalisasi nilai kebangsaan melalui sosialisasi partisipatif, dialog interaktif, dan refleksi atas kasus aktual ruang siber yang disesuaikan dengan karakteristik audiens. Persepsi peserta terhadap program berada pada kategori sangat baik (rata-rata 88,48), khususnya pada indikator tanggung jawab dan etika digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan intensitas program, optimalisasi media sosial, serta perluasan jangkauan ke daerah pelosok guna memperkuat *civic virtue* generasi digital secara berkelanjutan..

Kata kunci: Civic Virtue, Generasi Digital, Kabupaten Buleleng, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Abstract

The digital generation faces multifaceted challenges that threaten the quality of democratic citizenship, such as disinformation and cyberbullying. In Buleleng Regency, this vulnerability is exacerbated by juvenile criminality, narcotics abuse, cybercrimes, and the rampant promotion of online gambling on social media. The Buleleng Regency Government responded through the Center for National Insight Education (PPWK) as a non-formal educational strategy to strengthen the civic virtue of the digital generation. This study aims to analyze PPWK as a strategy for developing the civic virtue of the digital generation in Buleleng Regency by examining the educational models applied and participants' empirical perceptions. The study employed a qualitative approach with a case study strategy, supported by descriptive questionnaire data from 64 participants. Data were gathered through in-depth interviews, field observation, documentation, and a Likert-scale questionnaire, then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman (*data condensation, data display, and conclusion drawing/verification*). The results demonstrate that PPWK implements an educational strategy based on the internalization of national values through participatory socialization, interactive dialogue, and critical reflection on actual cyberspace dilemmas tailored to participants' characteristics. Participants' perceptions of the program fall into the very good category (average 88.48), particularly on the responsibility and digital ethics indicators. This study recommends strengthening program intensity, optimizing social media channels, and expanding outreach to remote areas to solidify the digital generation's civic virtue.

Keywords: Buleleng Regency, Civic Virtue, Digital Generation, National Insight Education Center

History:

Received : 25 Agustus 2026
Revised : 12 September 2026
Accepted : 23 September 2026
Published : 12 Oktober 2026

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



1. PENDAHULUAN

Keberlangsungan kehidupan bernegara dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur pokok yang dirumuskan dalam Konvensi Montevideo 1933, yaitu wilayah yang utuh, pemerintahan yang efektif, dan warga negara yang berkualitas. Di antara ketiga unsur tersebut, kualitas warga negara atau kompetensi kewarganegaraan menjadi perhatian yang semakin krusial di tengah dinamika kehidupan berbangsa saat ini. Urgensi ini semakin mengemuka seiring berkembangnya tantangan yang mengancam kualitas kewarganegaraan di era digital, khususnya meningkatnya penyebaran disinformasi dan polarisasi opini di ruang siber (Agus *et al.*, 2025).

Perkembangan teknologi yang mengarah pada digitalisasi turut memengaruhi pembentukan karakter dan kompetensi kewarganegaraan suatu bangsa. Kemajuan teknologi digital menghadirkan dua kemungkinan yang saling bertolak belakang, yaitu mendorong terwujudnya *good and smart citizenship* atau justru melemahkan karakter kewarganegaraan apabila tidak diimbangi dengan penguatan nilai kewarganegaraan. Fenomena ini melahirkan generasi digital (*digital native*) yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh internet, media sosial, dan berbagai platform digital, sehingga memungkinkan mereka mengakses informasi secara cepat dan membangun jejaring sosial tanpa batas geografis. Di sisi lain, tingginya intensitas interaksi di ruang siber menghadirkan tantangan serius berupa maraknya disinformasi dan hoaks yang melemahkan nilai persatuan (Aprillia *et al.*, 2022). Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya literasi digital dan menurunnya etika komunikasi publik di kalangan warganet (Isabella *et al.*, 2024). Tantangan era digital ini menuntut revitalisasi nilai-nilai Pancasila agar karakter kewarganegaraan generasi muda tidak tergerus oleh arus globalisasi (Marzuki *et al.*, 2025).

Tantangan moralitas digital tersebut tampak nyata dalam berbagai fenomena empiris. Data riset menunjukkan bahwa hanya sekitar 45% remaja yang memiliki pemahaman dasar memadai mengenai etika bermedia digital, sehingga kelompok ini sangat rentan terpapar dan menyebarkan hoaks (Faulin *et al.*, 2025). Menurunnya empati sosial juga tergambar dari tingginya kasus perundungan siber (*cyberbullying*), di mana sekitar 48% anak Indonesia dilaporkan pernah mengalami perundungan daring dalam interaksi digital mereka (Komdigi, 2025). Bahkan pada tahun 2025, terjadi kasus perundungan tragis di lingkungan kampus Universitas Udayana yang berujung pada kematian mahasiswa dan memicu perhatian luas masyarakat nasional (CNN Indonesia, 2025). Perilaku menyimpang generasi muda juga tampak dari maraknya provokasi daring dan ujaran kebencian, termasuk keterlibatan ratusan remaja dalam aksi demonstrasi anarkis yang berujung kerusakan pada tahun 2025.

Kabupaten Buleleng, yang dikenal luas sebagai kota pendidikan di Provinsi Bali, tidak luput dari fenomena melemahnya *civic virtue* generasi digital. Data mencatat 407 aksi kriminalitas terjadi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng sepanjang tahun 2025 (eklipping buleleng, 2025). Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng mencatat sedikitnya 102 pecandu narkoba aktif menjalani program rehabilitasi pada akhir tahun 2025 (Bkbp, 2026). Pada ranah kejahatan siber, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng mencatat peningkatan aduan dari 110 laporan pada tahun 2022 menjadi 142 insiden pada tahun 2023 (Prasetya, 2024). Fenomena lain yang sangat memprihatinkan adalah keterlibatan enam individu berprofesi sebagai pembuat konten (*influencer*) dalam promosi dan penyebaran konten perjudian daring di Kabupaten Buleleng. Berbagai persoalan sosial tersebut menegaskan urgensi strategi pendidikan kewarganegaraan yang aplikatif dan kontekstual di tingkat daerah (Budiarta *et al.*, 2025). Penguatan komitmen ideologis di kalangan generasi muda Buleleng menjadi kebutuhan mendesak guna membendung degradasi moralitas digital (Sidaryanti *et al.*, 2024).

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng menginisiasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), sebuah strategi pendidikan nonformal yang berfokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Penyelenggaraan PPWK berpijak pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta diperkuat secara teknis melalui Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/35/HK/2023. Sebagai program lintas sektor, PPWK berada di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buleleng dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua, mencerminkan komitmen kuat pimpinan daerah dalam pembentukan karakter bangsa berbasis Pancasila (Budiarta *et al.*, 2025). Penguatan ideologi Pancasila melalui kebijakan terstruktur ini memberikan arah dan pedoman hidup bermasyarakat yang kokoh bagi generasi muda (Budiarta *et al.*, 2024). Upaya pembiasaan perilaku berlandaskan nilai-nilai kebangsaan tersebut diharapkan mampu membentuk ekosistem karakter kewarganegaraan yang berkelanjutan (Kertih *et al.*, 2025).

Kajian mengenai pembentukan *civic virtue* sejatinya telah banyak dilakukan pada berbagai jalur pendidikan. Budiarta *et al.* (2025) mengungkapkan bahwa PPWK berfungsi sebagai instrumen strategis penguatan jati diri bangsa melalui kurikulum terintegrasi dan dialog nasional. Di jalur perguruan tinggi, Takarina *et al.* (2026) menemukan adanya kesenjangan antara kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang ideal dengan praktik pedagogis yang masih didominasi metode ceramah pasif sehingga kurang memberi ruang bagi pengembangan *civic skills* mahasiswa. Di jalur sekolah, Putirulan *et al.* (2022) menunjukkan peran penting pembelajaran PKn dalam membentuk watak kebajikan siswa, namun terbatas pada konteks pendidikan formal. Ketiga penelitian tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan riset nyata: generasi digital belum menjadi fokus kajian utama, dan analisis program pendidikan nonformal seperti PPWK masih terbatas pada aspek kebijakan tanpa menyentuh proses pembentukan karakter peserta secara komprehensif.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan generasi digital sebagai subjek utama serta mengkaji pendidikan wawasan kebangsaan melalui PPWK sebagai strategi penguatan karakter kewarganegaraan di tingkat pendidikan nonformal. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan model pendidikan yang diterapkan PPWK dalam pembentukan *civic virtue* generasi digital di Kabupaten Buleleng; dan (2) menganalisis persepsi peserta program terhadap pembentukan *civic virtue* mereka. Penelitian ini dilandasi oleh Teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang membedah pembentukan nilai melalui dialektika eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Christian *et al.*, 2022). Konsep *civic virtue* dipahami sebagai kesediaan moral warga negara untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan privat yang termanifestasi dalam watak dan komitmen kewarganegaraan (Quigley *et al.*, 1991). Pengembangan kebajikan kewarganegaraan ini menjadi modalitas fundamental dalam memperkuat integrasi sosial generasi digital di era disrupsi informasi (Yunita, 2023).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk mengkaji PPWK sebagai strategi pembentukan *civic virtue* generasi digital di Kabupaten Buleleng. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang dapat diamati dalam latar alami (Moleong, 2006). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna mendalam yang berasal dari individu atau kelompok terkait isu sosial tertentu (Creswell, 2018). Strategi studi kasus digunakan karena penelitian ini berupaya memahami fenomena pembentukan kebajikan

kewarganegaraan secara komprehensif dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* (Etikan, 2016), meliputi: (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sebagai informan kunci pengelola PPWK; (2) narasumber PPWK yang terdiri atas dosen, guru, dan birokrat pada empat kelompok kerja (Pokja Pancasila, Pokja UUD 1945, Pokja Bhinneka Tunggal Ika, dan Pokja NKRI); serta (3) peserta program PPWK yang berasal dari kalangan siswa SMA/SMK dan mahasiswa. Selain data kualitatif, penelitian ini melibatkan 64 peserta program berstatus siswa SMA/SMK sebagai responden kuesioner untuk mengukur persepsi mereka terhadap program (Creswell, 2022).

Pengumpulan data dilakukan secara triangulatif melalui empat teknik utama. Wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) digunakan sebagai teknik utama untuk menggali model pendidikan yang diterapkan dari sudut pandang informan (Creswell *et al.*, 2021). Observasi langsung dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran, interaksi antara peserta dan fasilitator, serta penanaman nilai *civic virtue* selama pelaksanaan program. Dokumentasi digunakan untuk menelaah profil kelembagaan, regulasi kebijakan, kurikulum, serta laporan kegiatan PPWK. Kuesioner dengan instrumen skala Likert digunakan untuk menjangkau persepsi 64 peserta program terhadap sepuluh indikator terkait pelaksanaan program dan *civic virtue*, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif menggunakan persentase kategori tanpa mengubah karakter penelitian sebagai riset kualitatif.

Data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif Miles *et al.* (1994), meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Data kuantitatif sederhana dari kuesioner dikategorikan menggunakan model Penilaian Acuan Patokan (PAP) lima kategori yang dikembangkan oleh Nurkencana dan Sunartana, dengan rentang skor 0,00–20,99 (Sangat Kurang), 21,00–40,99 (Kurang), 41,00–60,99 (Cukup), 61,00–80,99 (Baik), dan 81,00–100,00 (Sangat Baik). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, serta *audit trail* berupa penelusuran dokumentasi sistematis atas seluruh tahapan analisis (Sugiyono, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum PPWK

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Buleleng merupakan wadah pembinaan wawasan kebangsaan yang dibentuk sebagai bagian dari upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan, khususnya bagi generasi muda. Landasan hukum penyelenggaraannya mencakup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2023, dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/35/HK/2023 tentang susunan kepengurusan periode 2022–2025. Secara kelembagaan, PPWK berada dalam koordinasi Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng, dengan Sekretaris Daerah selaku Ketua dan Kepala Badan Kesbangpol selaku Wakil Ketua, mencerminkan posisi strategisnya sebagai program lintas sektor (Budiarta *et al.*, 2025).

Secara struktural, keanggotaan PPWK terbagi ke dalam empat kelompok kerja (pokja) yang merepresentasikan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pokja Pancasila, Pokja UUD 1945, Pokja Bhinneka Tunggal Ika, dan Pokja NKRI, masing-masing dengan cakupan materi operasional seperti religiusitas dan keadilan (Pancasila), demokrasi dan ketaatan hukum (UUD 1945), toleransi dan gotong royong (Bhinneka Tunggal Ika), serta kesatuan wilayah dan kemandirian (NKRI). Sasaran program pada tahap awal mencakup tenaga pendidik, organisasi kemasyarakatan, partai politik, generasi muda, dan aparatur desa/kecamatan, sebelum kemudian menajamkan sasaran pada periode 2022–2026 kepada generasi muda dan peserta didik jenjang SMA/SMK dan perguruan tinggi, termasuk Universitas Pendidikan Ganesha, STKIP Agama Hindu Singaraja, Universitas Panji Sakti, dan

Institut Mpu Kuturan, serta aparat sipil negara dalam konteks penguatan netralitas menjelang pemilihan umum.

3.2 Model Pendidikan PPWK dalam Membentuk Civic Virtue Generasi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPWK menerapkan strategi pendidikan yang tidak semata berorientasi pada transfer pengetahuan kognitif, melainkan dirancang sebagai proses konstruksi sosial berkelanjutan yang mencakup pengenalan nilai, penguatan norma kolektif, hingga internalisasi nilai ke dalam sikap dan perilaku peserta, termasuk dalam ruang digital. Kepala Badan Kesbangpol Buleleng menegaskan bahwa program ini bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air agar generasi muda menjadi penerus bangsa yang menghayati konsensus dasar kebangsaan (Hidayah, 2024). Pendekatan habituasi nilai-nilai kebangsaan secara konsisten terbukti memperkuat karakter dan perilaku kewarganegaraan peserta didik (Kertih *et al.*, 2025). Rekontekstualisasi identitas kebangsaan ini menjadi modalitas strategis dalam memperteguh kepribadian bangsa di tengah dinamika global (Lukito *et al.*, 2022). Penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan di daerah terbukti efektif merekatkan integrasi sosial dan kesadaran bela negara generasi muda (Paryanto *et al.*, 2022). Selain itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila yang berbasis pada kultur kearifan lokal sekolah mampu mentransformasikan kesadaran moral menjadi tindakan nyata (Septiani *et al.*, 2022).

Model atau strategi pendidikan yang diterapkan bervariasi sesuai karakteristik audiens, seperti metode andragogi digunakan untuk peserta mahasiswa guna menstimulasi pemikiran kritis melalui diskusi kasus, sedangkan peserta siswa lebih banyak didekati melalui ceramah dan tanya jawab yang bersifat terbimbing. Adaptasi ini menunjukkan upaya menyesuaikan strategi penanaman nilai dengan tingkat kematangan berpikir peserta. Selain itu, PPWK secara konsisten menghubungkan materi empat konsensus dasar dengan persoalan aktual generasi digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan siber, sebagaimana disampaikan narasumber, bahwa program ini “menghubungkan materi 4 pilar kebangsaan dengan isu-isu atau kasus yang banyak terjadi, dengan demikian, peserta tidak hanya memahami konsep kebangsaan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata”.

Temuan ini sejalan dengan Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann: kegiatan sosialisasi dan pembinaan PPWK merepresentasikan tahap eksternalisasi nilai kebangsaan, penerimaan nilai tersebut sebagai norma kolektif oleh peserta merepresentasikan tahap objektivasi, dan proses refleksi atas kasus aktual dalam kehidupan digital mengarah pada tahap internalisasi. Antusiasme dan keterlibatan aktif peserta dalam diskusi menunjukkan bahwa nilai kebangsaan diterima dengan baik, sementara harapan agar peserta menerapkan nilai tersebut dalam interaksi digital sehari-hari diakui oleh informan sebagai proses yang membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan penanaman pengetahuan dan sikap. Informan juga berharap PPWK dilengkapi dengan kegiatan praktik nyata seperti camping atau outbound untuk memperkuat internalisasi nilai dibandingkan pendekatan ceramah semata. Media sosial dipandang sebagai peluang strategis untuk memperluas jangkauan sosialisasi kepada generasi muda yang aktif secara digital, sehingga PPWK perlu mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai bagian dari strategi, disertai peran aktif fasilitator dalam menumbuhkan sikap kritis dan tanggung jawab digital pada peserta.

3.3 Persepsi Peserta terhadap Program PPWK

Persepsi 64 peserta program dijangkau melalui kuesioner skala Likert yang dikonversi menggunakan model Penilaian Acuan Patokan (PAP) lima kategori. Hasil pengolahan data terhadap sepuluh indikator disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Angka Persepsi Peserta terhadap Program PPWK

Indikator	Nilai	Kategori
Pemahaman Program	87,90	Sangat Baik
Metode Pembelajaran	86,61	Sangat Baik
Penyampaian Materi	84,35	Sangat Baik
Manfaat Program	88,23	Sangat Baik
Tanggung Jawab	90,65	Sangat Baik
Toleransi	89,19	Sangat Baik
Peduli Sosial	89,52	Sangat Baik
Nasionalisme	89,03	Sangat Baik
Moral	89,35	Sangat Baik
Etika Digital	90,00	Sangat Baik
Rata-rata	88,48	Sangat Baik

Sepuluh indikator tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua klaster. Klaster pelaksanaan program (Pemahaman Program, Metode Pembelajaran, Penyampaian Materi, dan Manfaat Program) seluruhnya berkategori Sangat Baik, dengan Penyampaian Materi sebagai indikator dengan capaian terendah (84,35), menjadi catatan evaluatif bagi penyelenggara. Klaster *civic virtue* (Tanggung Jawab, Toleransi, Peduli Sosial, Nasionalisme, Moral dan Etika Digital) menunjukkan capaian tertinggi pada indikator Tanggung Jawab (90,65), mengindikasikan bahwa penguatan rasa tanggung jawab merupakan dampak paling menonjol dari program. Indikator Etika Digital (90,00) menempati posisi kedua dan relevan dengan fokus penelitian pada generasi digital karena mengindikasikan peserta mampu menempatkan nilai kewarganegaraan secara spesifik pada perilaku bermedia digital mereka. Rata-rata keseluruhan sebesar 88,48 (Sangat Baik) memperkuat temuan kualitatif bahwa PPWK berkontribusi nyata terhadap pembentukan *civic virtue* generasi digital di Kabupaten Buleleng, sekaligus mengonfirmasi proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi nilai kebangsaan (Sukadi *et al.*, 2021). Keberhasilan internalisasi ini menegaskan pentingnya penguatan ideologi kebangsaan dalam merawat keutuhan integrasi nasional di era digital (Mahendra *et al.*, 2021).

3.4 Implikasi Strategis PPWK sebagai Pembentukan Civic Virtue Generasi Digital

Secara teoretis, temuan bahwa tahap eksternalisasi dan objektivasi nilai kebangsaan berlangsung relatif kuat, sementara internalisasi hingga ke tindakan nyata masih membutuhkan waktu yang lebih panjang, memperkaya Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann dalam menjelaskan pembentukan *civic virtue* pada generasi digital. Secara praktis, temuan ini menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dan pengelola PPWK untuk memperpanjang durasi penyampaian materi, memperkuat pemanfaatan media digital sebagai kanal sosialisasi, dan memperluas jangkauan program ke wilayah yang belum terjangkau; bagi lembaga pendidikan formal untuk membangun kolaborasi kurikulum yang mendorong praktik nyata nilai kewarganegaraan; serta bagi generasi digital sendiri untuk menindaklanjuti

pemahaman dan kepedulian yang telah terbentuk dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital. Secara metodologis, penggabungan data kualitatif dengan data kuesioner terbukti memperkuat keabsahan temuan melalui triangulasi metode, sekaligus membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengukur penerapan civic virtue dalam tindakan nyata secara lebih langsung melalui desain longitudinal atau observasi perilaku digital peserta.

4. SIMPULAN

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Buleleng terbukti menjadi strategi pendidikan nonformal yang adaptif dan efektif dalam memperkuat *civic virtue* generasi digital. Model pendidikan yang diterapkan memadukan sosialisasi interaktif, ceramah andragogis, dan diskusi reflektif atas isu-isu aktual ruang siber—seperti pencegahan hoaks, perundungan siber (*cyberbullying*), dan judi daring—yang diselaraskan dengan Empat Konsensus Dasar Berbangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI). Pendekatan ini berhasil memfasilitasi tahapan konstruksi sosial Berger dan Luckmann mulai dari eksternalisasi pengetahuan kebangsaan hingga objektivasi norma kewarganegaraan digital yang beradab.

Persepsi 64 peserta program terhadap efektivitas PPWK berada pada kategori Sangat Baik dengan skor rata-rata mencapai 88,48, di mana capaian tertinggi diraih pada indikator tanggung jawab (90,65) dan etika digital (90,00). Temuan ini membuktikan bahwa program PPWK berhasil mentransformasikan pemahaman nilai kebangsaan menjadi kesadaran etis dalam bermedia sosial di kalangan generasi muda. Di sisi lain, indikator penyampaian materi (84,35) menjadi catatan evaluatif yang mengindikasikan perlunya diversifikasi metode pembelajaran di luar ruangan (*outdoor activities*) guna memperkuat daya lekat internalisasi nilai.

Untuk mengoptimalkan keberlanjutan program, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan pengelola PPWK direkomendasikan untuk memperluas frekuensi dan durasi pelatihan, mengoptimalkan kanal media sosial sebagai sarana edukasi kebangsaan berbasis konten kreatif, serta mengintegrasikan kegiatan praktik lapangan seperti perkemahan kebangsaan (*camping*) dan *outbound*. Lembaga pendidikan formal di Kabupaten Buleleng disarankan membangun sinergi kurikulum dengan PPWK guna memperluas laboratorium kewarganegaraan bagi siswa dan mahasiswa. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menerapkan desain longitudinal atau observasi perilaku digital langsung guna mengukur dampak jangka panjang internalisasi *civic virtue* terhadap tindakan nyata generasi digital di ruang publik.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Agus, A. A., Rizal, A., Muhajir, M., & Jamalong, A. (2025). From awareness to action: Rethinking high school civic education for the digital generation in Indonesia. *Cogent Education*, 12(1), 2534156. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2534156>
- Aprillia, Dewi, R. S., & Setiawan, S. (2022). Digital comic media: Pancasila relationships in daily life. *MIMBAR PGSD Undiksha*, 10(2), 183–189. <https://doi.org/10.23887/jpgsd.v10i2.41811>
- Bkbp. (2026). *Laporan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba BNNK Buleleng periode November 2025*. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.
- Budiarta, I. W., Dewi Adhi Utami, A. A. I., Asri Sidaryanti, N. N., Suastika, I. N., Bagus Sanjaya, D., Yasoda Syosti Sara, N. K., Agnes Dewi Anantasya, Y., Maulida, R., Yolana Br Sipayung, M., & Risma Yanti, P. (2025). Internalization of Pancasila values through

- government policy in Buleleng Regency. *SHS Web of Conferences*, 221, 01002. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522101002>
- Budiarta, I. W., & Sidaryanti, N. N. A. (2024). Historical traces of Pancasila as the ideology of the Indonesian nation in providing direction and goals for life in society, nation and state. *Proceedings of the 6th International Conference on Law, Social Sciences and Education (ICLSSE 2024)*, 17 October 2024, Singaraja, Bali, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.17-10-2024.2353704>
- Christian, J., & Mawikere, M. C. S. (2022). Teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann: Relevansinya bagi pembentukan karakter di era digital. *Jurnal Jaffray*, 20(2), 165–182. <https://doi.org/10.25278/jj.v20i2.712>
- CNN Indonesia. (2025, 23 Oktober). Mahasiswa Universitas Udayana meninggal diduga akibat perundungan siber. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251023/perundungan-unud>
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (International student edition). SAGE Publications.
- Eklipping Buleleng. (2025). *Rekapitulasi data kriminalitas dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Buleleng sepanjang tahun 2025*. Pemerintah Kabupaten Buleleng. <https://bulelengkab.go.id/eklipping/kriminalitas-2025>
- Etikan, I. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Faulin, R., & Anwar, S. (2025). Etika komunikasi digital dan literasi media remaja dalam menangkal disinformasi di media sosial. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 4(1), 45–58. <https://doi.org/10.31604/jkp.v4i1.45-58>
- Hidayah, A. M. (2024). Analisis implementasi habituasi nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila. *Pedagogi: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 63–71. <https://doi.org/10.56393/pedagogi.v4i2.2396>
- Isabella, I., Alfitri, A., Saptawan, A., Nengyanti, N., & Baharuddin, T. (2024). Empowering digital citizenship in Indonesia: Navigating urgent digital literacy challenges for effective digital governance. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(2), 142–155. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i2.19258>
- Kertih, I. W., Sukadi, Budiarta, I. W., Mahysa Pradnyantari, N. M., Luh Artemesia Mahaputri, N., & Dwi Evayani, K. (2025). The effect of the Pancasila student profile strengthening project on the acceptance and habituation of Pancasila-based behavior. *SHS Web of Conferences*, 221, 01011. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522101002>
- Komdigi. (2025). *Survei status literasi digital dan prevalensi cyberbullying anak Indonesia tahun 2025*. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- Lukito, W. S., Permana, A., & Prasetyo, A. (2022). Pancasila and the recontextualization of Indonesia's state identity: International relations approach. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 179–195. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.122>
- Mahendra, P. R. A., & Kartika, I. M. (2021). Membangun karakter berlandaskan Tri Hita Karana dalam perspektif kehidupan global. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 488–498. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34832>
- Marzuki, Hasanah, N., & Cahyani, A. (2025). Pancasila dan tantangan di era digital. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 994–997. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1393>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Paryanto, Wance, M., Hadi, A., & Suhu, L. B. (2022). Kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Good Governance*, 4(2), 150–164. <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i2.537>
- Prasetya, D. (2024). *Dinamika kejahatan siber dan penanganan insiden keamanan informasi di Kabupaten Buleleng*. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng.
- Putirulan, M., Gaspersz, S., & Rugebregt, R. (2022). Peran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk civic virtue siswa di sekolah menengah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3410–3422. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3410>
- Quigley, C. N., & Bahmueller, C. F. (1991). *CIVITAS: A framework for civic education*. Center for Civic Education.
- Septiani, B. D., & Kurniawan, M. W. (2022). Internalization of Pancasila values based on school culture. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(3), 486–501. <https://doi.org/10.26618/jed.v7i3.8107>
- Sidaryanti, N. N. A., & Budiarta, I. W. (2024). Level of acceptance of Pancasila ideology by the young generation of Buleleng Regency. *Proceedings of the 6th International Conference on Law, Social Sciences and Education (ICLSSE 2024)*, 17 October 2024, Singaraja, Bali, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.17-10-2024.2353735>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sukadi, S., & Dewi, N. P. (2021). Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana dalam konteks pembelajaran abad ke-21. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 210–222. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.41215>
- Takarina, R., & Subagio, A. (2026). Kesenjangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dan penguatan civic skills mahasiswa perguruan tinggi. *Jurnal Moral dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 112–126. <https://doi.org/10.24036/jmce.v10i1.1120>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yunita, R. (2023). Pembentukan civic virtue generasi Z melalui pendidikan kewarganegaraan di era digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 215–228. <https://doi.org/10.17977/um019v8i2p215-228>